

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anonim, 2013, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abidin Farid, A. Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Darmakusuma, Danandoyo dan Yoshua Ruselvelt, 2015, *Tugas Hukum Acara perdata mengenai Gugatan dan Permohonan*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Effendy, Marwan, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi
- Ensiklopedia Indonesia, 1983, *Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Jilid 4*, Jakarta: Publishing Project
- Hadjon, Philipus M., 2005, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Hamdan, H. M., 2014, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartanti, Evi, 2014, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Lamintang, P.A.F, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pioner Jaya
- Lamintang, P.A.F dan Djisman Samosir, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru
- Leback, 2012, *Teori-Teori Keadilan. Six Theories of Justice*, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media
- Megawati, Madiasa Ablisar, Marlina, Suhaidi, 2014, *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, USU Law Journal, Vol.2.No.3 (Desember 2014)
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara,
- Morya Yopie, Immanuel Patiro, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Keni Media
- Mulyadi, Lilik, 2006, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Nawawi Arief, Barda, 1999, *Sari Kuliah Hukum Pidana II Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip*, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Neloe, 2012, *Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Verbum Publishing, hlm 81-84.

Projodikoro, R. Wiryono, 1976, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco

Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjowinoto, Petrus, dkk., 2006, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan Skripsi*, Semarang: Fak. Hukum Unika Soegijapranata

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru

Wasito, Hermawan, dkk., 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Yuntho, Emerson et.al., 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi - Policy-Paper*, Jakarta: ICW

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen jo. Keppres No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Perpres RI No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

### **Dokumen/Putusan**

Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006

Juknis Pemeriksaan Investigatif BPK, Bab VII huruf A angka 05

**Makalah/Artikel dan Internet**

Ronny Roy Hutasoit, 2010, *Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terhutang (Onverschulddigde Betaling) dalam Rangka pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan kasus Tindak Pidana Korupsi mantan Presiden Soeharto)*, Tesis (Tidak Dipublikasikan) Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, diunduh dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128845-T%2026742-Penggunaan%20instrumen-HA.pdf> pada 23 Oktober 2018

<https://dokumen.tips/documents/pembaharuan-hukum-tentang-alasan-penghapusan-pidananormalbab-1.html>, diunduh pada 23 Oktober 2018

